

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan daerah (pemda) mengalami masa baru seiring diberlakukannya desentralisasi fiskal. Undang-Undang (UU) yang mengatur desentralisasi fiskal ini yaitu UU No. 32 tentang pemerintahan daerah & 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, serta Peraturan Pemerintah (PP) No 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dalam melaksanakan UU No. 32 & 33 Tahun 2004 terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan pelaksanaan desentralisasi maka ditetapkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) No 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Dengan diterapkannya desentralisasi maka menuntut pemda untuk melakukan pengelolaan daerah dengan ekonomis, efektif, dan efisien atau lebih sering disebut dengan 3E. Untuk mencapai ekonomis, efektif, dan efisien maka ditetapkanlah permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Untuk lebih memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah dan untuk memaksimalkan 3E di pemda maka diterbitkanlah PP No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan diterapkannya desentralisasi di Indonesia maka diharapkan

Dengan diterapkannya desentralisasi di Indonesia maka diharapkan dapat meningkatkan pelayanan di berbagai sektor, terutama sektor publik. Dengan meningkatnya pelayanan di sektor publik akan memberikan efek ketertarikan penanaman modal oleh para investor. Investor yang tertarik untuk menanamkan investasinya pada suatu daerah membuat usaha baru di daerah yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan daerah itu sendiri.

Tujuan utama dari desentralisasi fiskal di Indonesia adalah menuntut pemda untuk mengelola keuangannya secara efektif, efisien dan ekonomis. Penganggaran belanja-belanja yang akan dilakukan setidaknya bertujuan untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing pemda itu sendiri. Ketika pengelolaan keuangan pemda dilakukan dengan baik maka perekonomian dapat meningkat. Tugas utama pemda adalah untuk melakukan pelayanan publik, ketika pelayanan publik dilakukan dengan baik maka kepercayaan publik akan meningkat terhadap pengelolaan uang masyarakat yang dilakukan oleh pemda. Ketika kepercayaan publik meningkat maka dapat dipastikan PAD juga akan meningkat.

Dengan diterapkannya desentralisasi di Indonesia tentunya membuat suatu daerah berfikir agar dapat menghasilkan dan menggali potensi daerah mereka masing-masing untuk meningkatkan PAD. Dengan

Alokasi Umum (DAU) yang diberikan pemerintah pusat diharapkan akan berkurang.

Demi memenuhi kebutuhan dan menggali potensi daerah masing-masing tentunya dibutuhkan adanya pendanaan daerah yang cukup besar, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan dan salah satu komponen penyumbang dana terbesar bagi pemerintah daerah yaitu DAU. David, dan Priyo (2007) dalam penelitiannya menemukan bahwa DAU mempunyai hubungan positif secara tidak langsung dengan PAD. Dengan penelitian tersebut walupun tidak secara langsung mempengaruhi PAD, akan tetapi daerah masih bergantung kepada DAU untuk menyokong keuangan pemerintah daerah. Jika keadaan ini terus berlanjut maka tujuan dari desentralisasi untuk mewujudkan daerah yang mandiri dan maju tidak akan tercapai. DAU yang diberikan pemerintah pusat kepada pemda seharusnya dimanfaatkan oleh pemda sebagai penunjang peningkatan kegiatan pelayanan publik sehingga dapat menaikkan PAD, sehingga DAU pun berperan positif dalam mewujudkan kemandirian daerah. Data menunjukkan proporsi PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20 persen (Kuncoro, 2007), disaat inilah kemandirian daerah itu dituntut untuk diwujudkan agar pemerintah daerah tidak ketergantungan dengan pemerintah pusat. Kondisi perbandingan antara PAD terhadap DAU menunjukkan sebagian besar pemda mengalami

Tabel 1.1 Perbandingan PAD terhadap DAU Tahun Anggaran 2009

Nama Kota	PAD	DAU	% PAD terhadap DAU
Kab. Kutai Barat	Rp 39.458	Rp 339.903	12%
Kota Bandung	Rp 374.712	Rp 989.246	38%
Kota Medan	Rp 365.979	Rp 900.206	41%
Kab. Mimika	Rp 45.434	Rp 193.779	23%
Kota Pekanbaru	Rp 181.756	Rp 340.974	53%
Kota Denpasar	Rp 156.036	Rp 360.017	43%
Kota Yogyakarta	Rp 135.107	Rp 414.352	33%
Kab. Bangka	Rp 31.045	Rp 278.345	11%
Kab. Sumbawa Barat	Rp 22.631	Rp 170.240	13%
Kab. Pesisir Selatan	Rp 17.003	Rp 43.556	39%

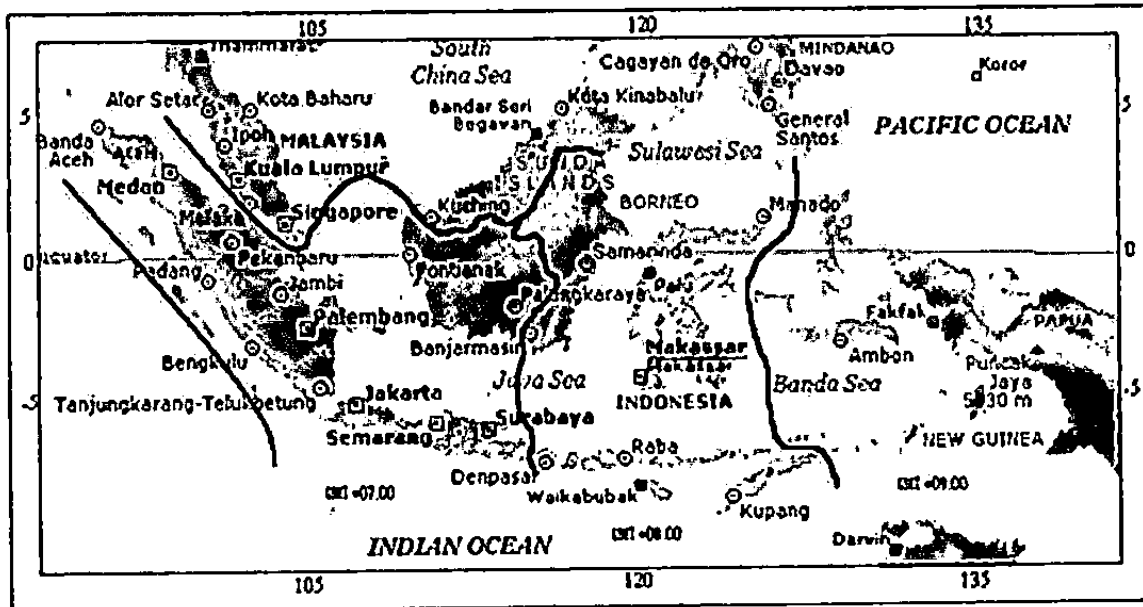
(Sumber : <http://www.djpk.depkeu.go.id/>)

Tabel di atas mengambil beberapa pemda secara acak di seluruh Indonesia. Dari tabel diatas menunjukkan DAU masih mendominasi pendapatan pemda di seluruh Indonesia. Tabel diatas menunjukkan rata-rata PAD tidak lebih dari 50% dibandingkan dengan DAU, dapat dikatakan bahwa PAD yang dituntutkan dapat membiayai daerah dalam era desentralisasi belum tercapai karena pemda masih tergantung dengan pemerintah melalui DAU.

Perbedaan karakteristik antara Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur yang mempunyai corak geografis, budaya, dan potensi yang sangat berbeda menyebabkan pemda berfikir untuk memaksimalkan segala sesuatu yang dimiliki untuk menjadikan potensi dan kekayaannya menjadi sejanta untuk mendapatkan PAD. Perbedaan potensi ini menyebabkan suatu kawasan ataupun daerah di Indonesia barat,

PEMBAGIAN WILAYAH WAKTU DI INDONESIA

KEP. PRES. NO. 41 Th 1987 BERLAKU MULAI 1 JANUARI 1988



Gambar 1.1. Peta Pembagian Wilayah Waktu Indonesia

Indonesia bagian barat yang cenderung berpenduduk yang relatif banyak dan padat terutama Pulau Jawa merupakan salah satu potensi kekuatan untuk meningkatkan pendapatan suatu daerah. Pembangunan sarana dan prasarana pun banyak dilakukan dan dikonsentrasikan di pulau Jawa yang termasuk kawasan Indonesia Barat, dikarenakan di pulau Jawa terdapat kota-kota besar dan salah satunya adalah Ibu Kota Negara Indonesia.

Indonesia bagian tengah yang terstruktur atas tanah gambut, dan mempunyai kawasan yang luas merupakan salah satu potensi yang bagus di dalam sumber daya alam mereka yang merupakan salah satu sumber daya untuk mengembangkan produksi dalam negeri yang berkorporasi

daya untuk mengembangkan produksi dalam negeri yang berkoridor Sumber Daya Alam (SDA). Indonesia bagian tengah merupakan salah satu penyumbang SDA terbesar bagi Indonesia, terutama sektor migas, akan tetapi akibat wilayah yang cukup luas dan sumber daya manusia yang kurang maka daerah-daerah di Indonesia tengah bisa dirata-rata tidak maksimal dalam mengelola sumber daya yang ada untuk diolah dan dijadikan pendapatan asli daerah masing-masing. Pembangunan kurang maksimal terlebih di daerah pedesaan, seperti di Kalimantan dan Sulawesi yang diakibatkan luasnya wilayah dan penduduk yang tersebar dan tidak merata.

Kawasan paling timur Indonesia merupakan kepulauan yang sangat kaya akan sumber daya, terutama sumber daya alam, akan tetapi kontur dan relief yang berupa gunung dan pegunungan serta wilayah daratan yang luas membuat pembangunan di daerah timur kurang maksimal. Kurang maksimalnya pembangunan ini dikarenakan sulit dijangkaunya daerah-daerah pelosok terutama di daerah Irian Jaya yang merupakan daratan paling luas di Indonesia Timur, sehingga sulit untuk mendistribusikan baik logistik pangan maupun material bangunan. Keterbatasan pendistribusian bahan pangan dan bangunan ini tentunya menghambat pembangunan sehingga mempengaruhi pendapatan daerah-daerah di kawasan Indonesia Timur.

Perbedaan relief antar wilayah Barat, Tengah dan Timur Indonesia

Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemda masing-masing tentunya akan disesuaikan sesuai dengan kontur dan potensi daerah masing-masing. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan PAD.

Perbedaan kontur geografis antara wilayah Indonesia Timur, Indonesia Tengah, dan Indonesia Barat tentunya akan memunculkan kebijakan masing-masing daerah untuk membelanjakan uang masing-masing pemda untuk meningkatkan PAD. PAD di pemda sebagian besar Indonesia tidak melebihi DAU sehingga perlu diteliti faktor-faktor yang terkait dengan ketercapaian PAD sehingga penelitian ini menyangkut tema atau judul **“Analisis Pengaruh Belanja Pegawai, BelanjaBarang dan Jasa, Belanja Modal Terhadap Pendapatan asli daerah” (Tinjauan Pada Pemda berkemampuan Keuangan Tinggi dan Rendah di Wilayah Indonesia Barat, Tengah, dan Timur)**. Penelitian ini menarik untuk diteliti karena belanja mempunyai potensi untuk mempengaruhi PAD. Dengan belanja yang baik maka akan mempengaruhi PAD.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka dalam penelitian ini dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Apakah belanja pegawai_{t-1} berpengaruh terhadap penerimaan PAD_t?
2. Apakah belanja barang dan jasa_{t-1} berpengaruh terhadap penerimaan PAD_t?

4. Apakah ada perbedaan pengaruh belanja modal_{t-1}, belanja barang dan jasa_{t-1}, dan belanja pegawai_{t-1} terhadap PAD_t di Wilayah Indonesia barat, tengah, dan timur?
5. Apakah ada perbedaan pengaruh belanja modal_{t-1}, belanja barang dan jasa_{t-1}, dan belanja pegawai_{t-1} terhadap PAD_t di pemda yang berkemampuan keuangan tinggi dan rendah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah belanja pegawai_{t-1} berpengaruh terhadap penerimaan PAD_t.
2. Untuk mengetahui apakah belanja barang dan jasa_{t-1} berpengaruh terhadap penerimaan PAD_t.
3. Untuk mengetahui apakah belanja modal_{t-1} berpengaruh terhadap penerimaan PAD_t.
4. Untuk mengetahui Apakah ada perbedaan pengaruh belanja modal_{t-1}, belanja barang dan jasa_{t-1}, dan belanja pegawai_{t-1} terhadap PAD_t di Wilayah Indonesia barat, tengah, dan timur.
5. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan pengaruh belanja modal_{t-1}, belanja barang dan jasa_{t-1}, dan belanja pegawai_{t-1}

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat di bidang teori

- a. Menambah pemahaman tentang pemda khususnya yang berkaitan dengan belanja daerah, pendapatan daerah dan kemampuan keuangan daerah.
- b. Menjadi acuan atau tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berbasis pemda khususnya belanja daerah, pendapatan daerah dan kemampuan keuangan daerah.
- c. Menambah atau memperkaya penelitian tentang perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia.

2. Manfaat di bidang praktik

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat maupun pemda dalam membuat kebijakan-kebijakan tentang

1. di daerah dengan kemampuan